

PEMILIHAN UMUM

ANTARA CITRA, TEKNOLOGI, DAN JANJI PEMIMPIN

Editor
Yoseph Yapi Taum

Kontributor:

Novita Dewi, Truly Almendo Pasaribu, Em. Catur Rismiati,
Ignatia Esti Sumarah, Paulina H. Prima Rosa, Johannes Eka Priyatma,
Iwan Binanto, Agnes Maria Polina, H. Purwanta,
Silverio R. I. Aji Sampurno, B. B. Dwijatmoko, dan Arina Isti'anah



Penerbit
Universitas Sanata Dharma

PEMILIHAN UMUM

ANTARA CITRA, TEKNOLOGI, DAN JANJI PEMIMPIN

Copyright © 2014

Penerbit Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.

Publishing by:

Penerbit Universitas Sanata Dharma
Kompleks Sanata Dharma
Jl. Affandi (Gejayan) Mrican,
Yogyakarta 55281
Telp. (0274) 513301, 515253;
Ext.1527/1513; Fax (0274) 562383
e-mail: publisher@usd.ac.id



Editor

Yoseph Yapi Taum

Kontributor

- Novita Dewi • Truly Almendo Pasaribu
- Em. Catur Rismiyati • Ignatia Esti Sumarah
- Paulina H. Prima Rosa
- Johannes Eka Priyatma • Iwan Binanto
- Agnes Maria Polina • H. Purwanta
- Silverio R. I. Aji Sampurno
- B. B. Dwijatmoko • Arina Isti'anah

Sampul & layout: Thoms

Cetakan Pertama

vi, 140 hlm.; 148 x 210 mm.

ISBN: 978-602-9187-94-6

EAN: 9-9786029-187946

Universitas Sanata Dharma berlandaskan daun teratai coklat bersudut lima dengan sebuah obor hitam yang menyala merah, sebuah buku terbuka dengan tulisan "*Ad Maiorem Dei Gloriam*" dan tulisan "Universitas Sanata Dharma Yogyakarta" berwarna hitam di dalamnya. Adapun artinya sebagai berikut.

Teratai: kemuliaan dan sudut lima: Pancasila; Obor: hidup dengan semangat yang menyala-nyala; Buku yang terbuka: ilmu pengetahuan yang selalu berkembang; Teratai warna coklat: sikap dewasa yang matang; "Ad Maiorem Dei Gloriam": demi kemuliaan Allah yang lebih besar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apa termasuk fotokopi, tanpa izin tertulis dari penerbit.

DAFTAR ISI

Daftar Isi	iii
Kata Pengantar Editor: PEMILIHAN UMUM: ANTARA CITRA, TEKNOLOGI, DAN JANJI PEMIMPIN	1
BAB I CALEG PEREMPUAN DALAM B/DERITA	7
• <i>Novita Dewi</i> • <i>Truly Almendo Pasaribu</i>	
1. Pengantar	7
2. Analisis Wacana Post-Strukturalis Feminis	8
3. Citra Caleg Perempuan dalam Pileg 2014	9
3.1 Kesulitan yang Dihadapi Caleg Perempuan	12
3.2 Strategi Caleg Perempuan	15
3.3 Pandangan Masyarakat tentang Caleg Perempuan ...	19
3.4 Himbauan terhadap Caleg Perempuan	20
4. Penutup	23
Daftar Pustaka	24
BAB II MAHASISWA PGSD DAN PEMILU 2014	29
• <i>Em. Catur Rismiati</i> • <i>Ignatia Esti Sumarah</i>	
1. Pengantar	29
2. <i>Theory of Planned Behavior (TPB)</i>	31
3. Pendidikan Karakter Bangsa.....	34

4.	Masyarakat Madani.....	35
5.	Praktik Pendidikan Karakter	36
6.	Sikap Mahasiswa PGSD.....	37
7.	Perbedaan Sikap Mahasiswa.....	40
8.	Penutup	43
	Daftar Pustaka	45

BAB III

PENERAPAN SISTEM *E-VOTING* UNTUK PEMILU:

	BELAJAR DARI JEMBRANA, BALI	49
	• <i>Paulina H. Prima Rosa</i> , • <i>Johanes Eka Priyatma</i> , • <i>Iwan Binanto</i> , • <i>Agnes Maria Polina</i>	
1.	Pengantar	49
2.	Implementasi <i>E-Voting</i> di Kabupaten Jembrana	52
3.	<i>E-Voting</i> di Jembrana Sebagai Sistem yang Kompleks Adaptif	53
4.	Ketegangan Adaptif	54
5.	Laju Perubahan	57
6.	Tuntutan Kompleksitas	57
7.	Disain Modular	58
8.	Umpan Balik Positif	58
9.	Kerumitan yang Saling Terkait	59
10.	Ritme Koordinasi	59
11.	<i>E-Voting</i> di Jembrana: Mungkinkah Diperluas?	60
12.	Dimensi Makro: Politis, Legal, Sosial	61
13.	Dimensi Mikro: Aplikasi <i>E-voting</i>	64
14.	Penutup	65
	Daftar Pustaka	68

BAB IV	
TANGGAPAN PEMILIH PEMULA TERHADAP PEMILU 2014	73
• <i>H. Purwanta</i>	
1. Pengantar	73
2. Persaingan Sehat	78
3. Partisipasi Politik.....	83
4. Penutup	92
Daftar Pustaka	94
BAB V	
DANGDUT DAN PEMILU DI INDONESIA:	
KASUS YOGYAKARTA.....	97
• <i>Silverio R. L. Aji Sampurno</i>	
1. Pengantar	97
2. Musik dan Politik.....	100
3. Musik Dangdut	101
4. Musik Dangdut dan Pemilu di Yogyakarta	105
5. Penutup	109
Daftar Pustaka	111
BAB VI	
JANJI DALAM WACANA PEMILU: STUDI KORPUS	113
• <i>B.B. Dwijatmoko</i> • <i>Arina Isti'annah</i>	
1. Pengantar	113
2. Bentuk-bentuk Janji	115
2.1 Janji dengan Adverbia <i>Akan</i>	116
2.2 Janji dengan Adverbia <i>Harus</i>	120
2.3 Janji dengan Nomina <i>Program</i>	124
2.4 Janji dengan Verba <i>Berjanji</i>	125
2.5 Janji dengan Verba <i>Ingin</i>	126

2.6	Janji dengan Nomina <i>Janji</i>	128
2.7	Janji dengan Verba <i>Bertekad</i>	129
2.8	Janji dengan Verba <i>Menekankan</i>	130
3.	Penutup	130
	Daftar Pustaka	132
	BIODATA PENULIS.....	133

Kata Pengantar Editor

PEMILIHAN UMUM: ANTARA CITRA, TEKNOLOGI, DAN JANJI PEMIMPIN

Buku yang berjudul *Pemilihan Umum: Antara Citra, Teknologi, dan Janji Pemimpin* ini merupakan salah satu wujud perhatian dosen Universitas Sanata Dharma (USD) terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemilihan umum adalah salah satu proses demokrasi yang penting, yang perlu dibahas dan dikaji secara serius dan mendalam. Tulisan-tulisan dalam buku ini berasal dari laporan penelitian yang dilaksanakan dalam tema besar “Sanata Dharma Berbagi.” Tema ini adalah salah satu persoalan penting yang menjadi program prioritas pimpinan USD.

Dalam buku ini, masing-masing penulis berusaha mengkaji fenomena pemilihan umum dari disiplin ilmu yang digelutinya. Penetapan pilihan topik yang lebih spesifik tak terhindarkan, karena sebuah penelitian ilmiah tidak terlepas dari tuntutan kerangka teori dan metodologi yang ketat. Sekalipun tema pemilihan umum merupakan sebuah tema sosial-politik, persoalan itu sesungguhnya dapat dikaji dari disiplin ilmu pendidikan, media, ilmu komputer, linguistik, antropologi, dan kesusastraan –seperti dipaparkan dalam buku ini.

Posisi calon legislatif (caleg) perempuan menjadi salah satu tema penting yang menggugah kesadaran kita. Dengan judul yang unik dan menohok, “Caleg Perempuan dalam B/Derita”, Bab I buku ini terasa menggugah dan menyengat kesadaran kita. Pemberitaan atau citra perempuan di media massa dalam segala aspek kehidupannya begitu bias gender. Hambatan pokok keterlibatan kaum perempuan

dalam dunia politik adalah sistem patriarki yang menempatkan perempuan pada posisi inferior dibandingkan dengan laki-laki, termasuk persoalan kekurangan finansial. Ada asumsi bahwa urusan finansial dan menjadi caleg adalah urusannya kaum laki-laki. Caleg perempuan benar-benar menghadapi tembok-tembok kultural yang membelenggu kebebasan mereka untuk mengaktualisasikan kemampuan yang mereka miliki. Alhasil, masyarakat kita masih menunjukkan keraguan atas peranserta perempuan yang secara kultural terpasung oleh peran domestiknya. Masih kuat adanya asumsi bahwa medan politik adalah milik laki-laki.

Tulisan dalam Bab II yang berjudul “Mahasiswa PGSD dan Pemilu 2014” mengungkap peran strategis mahasiswa calon guru Sekolah Dasar. Strategis karena mereka akan memiliki peran sentral dalam pelaksanaan pendidikan karakter dan tercapainya masyarakat madani. Mereka bakal menjadi ujung tombak pembentukan manusia muda yang lebih berkualitas. Tulisan ini berupaya mengungkap sikap mahasiswa PGSD terhadap Pemilu 2014. Studi lapangan yang dilakukan membuktikan bahwa sikap mahasiswa PGSD terhadap Pemilu 2014 sangat positif. Sikap positif itu disebabkan karena kesadaran mereka untuk turut menciptakan perubahan. Mereka ingin menunjukkan tanggung jawab moral sebagai calon pendidik untuk menciptakan stabilitas sosial bangsanya.

Bab III “Penerapan Sistem *E-Voting* untuk Pemilu: Belajar dari Jembrana, Bali” menyajikan sebuah ulasan tentang kemungkinan penggunaan teknologi *E-Voting* untuk Pemilu di Indonesia. Sistem ini sangat menghemat biaya. Selain karena tidak mempergunakan kertas suara, *e-voting* memungkinkan pemangkasan rekapitulasi berjenjang dan mengurangi jumlah petugas yang dibutuhkan di TPS. Sudah banyak negara di dunia yang menggunakan sistem *E-voting* dalam pemilihan umumnya, di antaranya Australia, Belgia, Canada, Malaysia, dan Korea.

Di Indonesia, *e-voting* sudah dimanfaatkan dalam beberapa pemilihan kepala desa, misalnya di Kabupaten Jembrana, Bali.

Kabupaten ini sudah mengimplementasi sistem *e-voting* sejak tahun 2009 dan dianggap sukses. Pertanyaannya, mengapa pengalaman ini tidak dengan cepat dapat diadopsi daerah lain atau diadopsi untuk pemilu di tingkat propinsi maupun nasional? Salah satu kendala utamanya adalah belum adanya payung hukum yang mengatur keabsahan sistem *e-voting* (dimensi makro) serta belum tersedianya sumber daya yang berkaitan dengan aplikasi sistem *e-voting* (dimensi mikro). Apabila kedua persoalan ini dapat diatasi dengan baik, penerapan sistem *e-voting* di tingkat nasional akan menjadi sebuah peluang besar bagi terciptanya kehidupan demokrasi yang lebih efektif dan efisien di Indonesia.

Pada prinsipnya tulisan dalam Bab IV yang berjudul “Tanggapan Pemilih Pemula Terhadap Pemilu 2014” menghasilkan pandangan yang mirip dengan tulisan dalam Bab II. Ditinjau dari perspektif partisipasi, keterlibatan generasi muda pemilih pemula dalam proses Pemilu 2014 cukup menggembirakan. Mereka ternyata tidak memilih berdasarkan ikatan emosional-primordial. Pilihan mereka benar-benar kritis dan rasional dalam mempertimbangkan calon pemimpinnya. Sayangnya, partisipasi politik mereka berhenti hanya pada proses Pemilu dan tidak berlanjut pada hasilnya. Kaum pemilih pemula tampaknya enggan mengawal dan mengawasi kinerja para pemimpin nasional.

Bab V “Dangdut dan Pemilu di Indonesia: Kasus Yogyakarta” mengungkap hubungan pertunjukan dangdut dengan pemilu di Indonesia. Tulisan ini menunjukkan fakta bahwa penggunaan musik dangdut dalam kampanye hanya berfungsi untuk menarik massa calon pemilih saja. Perolehan suara dalam pemilu tetap ditentukan oleh kualitas program yang ditawarkan oleh partai dan atau calon legislatif yang bersangkutan. Musik dangdut pun hanya berfungsi sebagai ‘obat penenang’ massa, khususnya ketika massa mulai terlihat jenuh. Akibatnya, janji-janji kampanye politik mudah dilupakan dan kampanye tak ubahnya menjadi sekadar ‘festival dangdut’.

Bab VI menyajikan sebuah studi khas linguistik, “Janji dalam Wacana Pemilu: Studi Korpus.” Jalan paling cepat dan mudah yang ditempuh calon pemimpin (caleg) untuk mengambil hati calon pemilihnya adalah dengan “mengobral janji-janji”. Studi terhadap korpus menghasilkan delapan modus janji, yakni: akan, harus, program, berjanji, ingin, janji, bertekad, dan menekankan. Tulisan ini memberikan apresiasi positif terhadap janji-janji para pemimpin yang diucapkan dalam masa kampanye. Janji yang disampaikan pemimpin partai atau politikus memenuhi syarat kejujuran seperti yang disampaikan Searle and Vanderveken (1985). Mereka tampak sungguh-sungguh jujur dan serius akan melaksanakan apa yang mereka janjikan itu.

Merengungi Pemilu, Merawat Demokrasi

Mengkaji dan merengungi berbagai aspek pemilihan umum, termasuk kekuatan dan kelemahannya, sesungguhnya merupakan sebuah bentuk tanggung jawab kita di dalam merawat demokrasi bangsa. Pemilihan umum yang demokratis menjamin hak setiap warga untuk mengekspresikan pendapatnya dalam menentukan pemimpin yang mampu memperjuangkan kepentingan dasar pemilihnya. Pemilihan umum tidak diharapkan menjadi sekadar festival dangdut, karena yang dipertaruhkan adalah martabat dan masa depan bangsa.

Apabila kehidupan berdemokrasi di Indonesia dirunut genealogi dan sejarahnya, tampak bahwa demokrasi kita penuh warna dan dinamika. Pada masa pemerintahan Orde Lama, Presiden Soekarno menjalankan model demokrasi terpimpin, yang menonjolkan peran presiden sebagai seorang pengambil keputusan terpenting. Pada masa Orde Baru, dicanangkanlah model “demokrasi pancasila”, yang menekankan kebebasan yang bertanggung jawab. Demokrasi Pancasila diwarnai dengan konformitas ideologi yang dijamin oleh pelaksanaan asas tunggal Pancasila. Watak pemerintahan Orde Baru

yang otoriter dan militeristik mengakibatkan pemahaman orang tentang prinsip-prinsip demokrasi Pancasila menjadi kabur.

Pemilihan umum tahun 2014 memperlihatkan kehidupan demokrasi kita yang lebih dinamis. Pemilu tahun ini telah mengantarkan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden. Perjalanan kedua pemimpin ini menuju RI 1 dan RI 2 bukanlah perjalanan yang mudah. Saingan pasangan ini memiliki kekuatan yang besar, yang didukung oleh mayoritas partai di Indonesia, yang menguasai parlemen. Akan tetapi, pemilihan umum tahun ini berlangsung relatif aman. Banyak pelajaran berharga dalam hal kematangan hidup berdemokrasi yang dapat dipetik dan dipelajari dari peristiwa suksesi nasional tahun 2014 ini.

Beberapa waktu terakhir ini, bangsa Indonesia dihadapkan pada persoalan yang membingungkan antara penerapan sistem Demokrasi Presidensial dan sistem Demokrasi Parlementer. Dinamika yang terjadi pasca-pilpres 2014 di gedung DPR/MPR memperlihatkan watak kekuasaan yang jauh dari etika dan kesantunan politik Pancasila. Masyarakat tidak dapat membedakan antara 'koalisi' dengan 'persekongkolan' politik. Pihak yang menjadi pemenang pemilu legislatif maupun pemilu presiden justru sama sekali tidak berdaya menghadapi manuver partai-partai yang bersekongkol untuk merebut kekuasaan.

Pertanyaannya adalah: bagaimanakah bentuk demokrasi Indonesia? Adakah pola dan prinsip-prinsip demokrasi dalam praktik hidup kenegaraan dalam sejarah bangsa Indonesia, terutama pada era reformasi ini? Manakah prinsip-prinsip demokrasi yang belum atau tidak terpenuhi? Bagaimanakah posisi perempuan dalam kehidupan publik di Indonesia? Masih adakah diskriminasi secara seksual? Dalam situasi bangsa yang sangat pluralistik ini, watak demokrasi seperti apakah yang paling tepat diterapkan atau diupayakan untuk diterapkan? Demokrasi seperti apakah yang sedang dipertontonkan para pemegang kekuasaan di Indonesia? Seperti inilah hasil pemilihan umum kita? Jika diperlukan sebuah

strategi pengaturan sosial (*social engineering*), pendidikan demokrasi yang bagaimanakah yang perlu ditanamkan kepada generasi muda bangsa Indonesia? Sistem pemilihan umum seperti apakah yang paling tepat bagi kondisi bangsa kita?

Pertanyaan-pertanyaan seperti itu patut diajukan dan didiskusikan secara lebih jujur dan terbuka. Bangsa ini harus belajar dari kesalahan masa lalu untuk menjadi semakin matang dan dewasa dalam membangun kehidupan berdemokrasi yang lebih sehat, yang menjamin hak-hak dasar setiap warga negaranya untuk menyampaikan pendapat dan berpartisipasi dalam pembangunan bangsa. Hanya dengan demikian, bangsa kita akan diperhitungkan sebagai bangsa yang bermartabat di antara bangsa-bangsa.

BAB IV

TANGGAPAN PEMILIH PEMULA TERHADAP PEMILU 2014

• *H. Purwanta*

1. Pengantar

Dalam masyarakat Indonesia Pemilihan Umum atau disingkat Pemilu seringkali disebut sebagai masa pesta demokrasi, yaitu rakyat berbondong-bondong datang ke Tempat Pemungutan Suara untuk menentukan pilihan para pemimpin mereka, baik tingkat nasional maupun lokal. Pesta demokrasi itu berlangsung lima tahun sekali. Semenjak Pemilu pertama pada tahun 1955 yang berlangsung secara demokratis dan damai, Indonesia telah melakukan Pemilu sepuluh kali. Orde Baru (1966 – 1998) menjadikan Pemilu sebagai ritual politik yang dilaksanakan secara rutin setiap 5 tahun sekali, mulai tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan yang terakhir tahun 1997. Pada masa Reformasi, tradisi Pemilu dilanjutkan dengan dilaksanakan pada tahun 1999, 2004 dan 2009. Perubahan besar terjadi pada tahun 2004. Sejak tahun itu Pemilu dilaksanakan untuk memilih anggota legislatif (DPR dan DPRD) serta eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden).

Pemilu diyakini sebagai salah satu ikon pelaksanaan demokrasi. Apabila demokrasi dianalogikan sebagai jalan menuju cita-cita, salah satu pertanyaan yang muncul adalah apakah demokrasi merupakan jalan yang tepat bagi Indonesia dalam mewujudkan masyarakat adil makmur sentosa? Meski sejak proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945, bangsa Indonesia sudah melewati tiga periode sejarah, yaitu masa pemerintahan presiden

Soekarno, Orde Baru dan Orde Reformasi, tetapi cita-cita adil makmur sentosa tidak kunjung terwujud, bahkan terasa semakin jauh. Belum terwujudnya cita-cita kiranya dapat menjadi pijakan refleksi akan perjalanan demokrasi bangsa Indonesia. Demokrasi awalnya lahir dan berkembang pada masyarakat Barat yang karakter kebudayaannya adalah individualisme, rasionalisme dan empirisme. Mungkinkah ketidakcocokan sistem demokrasi bagi bangsa Indonesia terutama disebabkan oleh perbedaan karakter kebudayaan dengan bangsa-bangsa Barat? Apabila karakter kebudayaan menjadi problem, kiranya bangsa Indonesia perlu segera mencari dan menemukan sistem rekrutmen kepemimpinan nasional yang cocok.

Meski dalam perjalanannya menemui banyak kerikil-kerikil tajam dan tanpa bermaksud menutup ruang bagi usaha menemukan sistem yang lebih cocok, demokrasi sampai saat ini dipandang sebagai sistem yang terbaik bagi bangsa Indonesia, terutama dalam rangka mengelola keberagaman di berbagai aspek kehidupan yang begitu menonjol. Berbagai alternatif yang pernah dipikirkan dan ditawarkan, seperti sistem kerajaan dan kekhalfahan, dipandang kurang mampu memayungi keberagaman Indonesia. Dari sudut pandang ini, pengembangan demokrasi menjadi satu-satunya kemungkinan sampai hari ini.

Pengembangan demokrasi Indonesia, seperti telah disinggung di atas, dilakukan antara lain dengan mengadakan pemilihan presiden langsung pada Pemilu 2004. Semenjak kejatuhan Orde Baru, tema tentang mengembalikan spirit reformasi menjadi topik kampanye nasional.

This year's vote results tell us that Indonesians have not changed their minds about reformasi. What they are telling us is that they continue to have faith in reformasi, but they are worried that the promises of reformasi are not being kept. They worry that the country's future is going in the wrong direction, that the present is not much better than the past. They worry that as stakeholders of this great nation, they are becoming increasingly marginalized in our

country's political development. You do not have to wait until the last votes are counted to feel this public mood.

That is why when speaking of "change", I must specify that I am talking about change for the better. Change itself is easy. But change for the sake of changing is useless. And no one wants to change for the worse.

What we need is a change for the better. A better government. A better governance. A better society. A better political culture. A better environment. A better future. And that is why I decided to run for the President of Indonesia, because I truly believe in that Indonesia can do better, can be better, and deserves better. (Yudoyono, 2004: 3-4)

Dari kutipan di atas tampak bahwa masyarakat Indonesia tetap memimpikan terwujudnya pemerintahan sesuai dengan cita-cita reformasi dan Susilo Bambang Yudoyono memahami dan mengeksplorasi itu dalam pencalonannya pada Pemilu 2004. Hasilnya adalah terpilihnya SBY yang berpasangan dengan Yusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden. Bahkan pada Pemilu 2009, SBY terpilih kembali menjadi presiden berpasangan dengan Budiono sebagai wakil. Pertanyaan yang mengemuka adalah apakah pengembangan demokrasi melalui pemilihan langsung presiden dan wakil presiden mampu menaikkan kualitas kepemimpinan nasional, sehingga meningkatkan keadilan dan kemakmuran rakyat? Ternyata pemilihan langsung eksekutif tidak serta merta meningkatkan kualitas pemimpin nasional yang terseleksi. Pemerintahan SBY yang berlangsung dua periode, yaitu 2004 – 2009 dan 2009 – 2014, tidak terlepas dari kritik. Ungkapan kekecewaan dan kritik terutama ditujukan pada periode ke dua pemerintahannya. Salah satu permasalahan yang mengemuka sepanjang pemerintahan periode ke dua SBY adalah skandal Bank Century:

Skandal Century menjadi berita besar sejak akhir Agustus 2009. Berita besar pertama mengungkapkan Wakil Presiden ketika itu, Jusuf Kalla, mengaku tak tahu-menahu penyelesaian Century sehingga dana penyehatan bank itu membengkak dan berpotensi merugikan negara hingga Rp 5 triliun. Bahkan, kata Kalla, dia tidak dilapori mekanisme penyelesaian bank yang dinilai gagal secara sistemik itu. "Memang waktu itu (Century) krisis dan tak jelas bagaimana penyelesaiannya. Presiden sedang di luar negeri dan saya di Jakarta. Tetapi, saya tak tahu menahu" ungkap Kalla.

Sejak pernyataan Kalla itulah skandal Century, suka atau tidak, memasuki ranah politik. Presiden Yudhoyono meminta skandal dibongkar tuntas dan Wakil Presiden Boediono serta Menkeu Sri Mulyani Indrawati menyatakan siap diperiksa. (Sahasrad,2009: 142)

Selain terbebani oleh skandal Century yang ditengarai melibatkan partai dan dirinya, kritik mendasar yang muncul terhadap pemerintahan ke dua SBY adalah tanggapan terhadap rilis hasil penelitian *Fund for Peace* yang menempatkan Indonesia pada urutan 63 dari 178 daftar negara-negara gagal (*failed states*). Azyumardi Azra menyatakan bahwa urutan 63 menunjukkan bahwa Indonesia belum dapat dikategorikan sebagai negara gagal. Posisinya lebih tepat dinyatakan sebagai dalam lampu kuning atau *warning* (Republika, 5 Juli 2012). Kritik tidak hanya berupa artikel atau opini yang dimuat di surat kabar, tetapi tidak sedikit yang ditulis dalam bentuk buku, antara lain: Desmond J. Mahesa, *Kita Diam atau Memakzulkan* (Jakarta, Mei 2012); Adhyaksa Dault, *Menghadang Negara Gagal: Sebuah Ijtihad Politik* (Jakarta, Agustus 2012); Bambang Soesatyo, *Republik Galau: Presiden Bimbang, Negara Terancam Gagal* (Jakarta, September 2012); Muhadam Labolo, *Memperkuat Pemerintahan Mencegah Negara Gagal: Sebuah Ikhtiar Mewujudkan Good Governance dan Negara Kesejahteraan* (Jakarta, Oktober 2012)

Posisi “*warning*” menunjukkan bahwa pemerintahan periode ke dua Presiden Susilo Bambang Yudoyono gagal membawa Indonesia ke kemajuan, tetapi sebaliknya dalam banyak hal mengalami kemunduran. Korupsi menjadi semakin mengemuka dengan munculnya banyak kasus yang terungkap dan melibatkan berbagai unsur pemerintahan, baik legislatif, yudikatif maupun eksekutif. Kekerasan juga tidak ketinggalan banyak mewarnai surat kabar-surat kabar Indonesia, baik berbasis keyakinan agama maupun suku/etnik.

Di latar belakang oleh berbagai peristiwa nasional yang memprihatinkan, Pemilihan Umum (PEMILU) yang diselenggarakan pada tahun 2014, yaitu Pemilihan Umum Legislatif pada tanggal 9 April 2014 dan Pemilihan Umum Presiden/Wakil Presiden pada tanggal 9 Juli 2014 menjadi tonggak penting perkembangan demokrasi Indonesia

Pertanyaan yang mengemuka adalah apakah masyarakat memandang PEMILU 2014 masih sebagai salah satu jalan terbaik untuk membangun Indonesia menjadi maju? Pandangan itu terkait dengan pengalaman PEMILU yang telah dilaksanakan sepanjang masa reformasi kurang mampu melahirkan pemimpin nasional yang berkualitas. Bahkan partai politik yang lahir dan menjadi peserta PEMILU pun lebih banyak menampilkan diri sebagai sekedar kendaraan menuju kekuasaan dari pada manifestasi ideologis dalam rangka memajukan masyarakat Indonesia.

Tulisan ini mencoba mengkaji Pemilu 2014 dari dua permasalahan utama, yaitu pandangan generasi muda pemilih pemula Yogyakarta terhadap kualitas proses dan hasil Pemilu 2009 dan partisipasi mereka dalam Pemilu 2014. Permasalahan pertama mencoba mendalami persepsi generasi muda Yogyakarta terhadap kualitas Pemilu tahun 2009 khususnya dan demokrasi Indonesia pada umumnya. Di pihak lain, permasalahan ke dua mencoba mendalami sejauh mana partisipasi mereka terhadap proses dan hasil Pemilu 2014.

Pengumpulan sumber dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang disebarakan kepada mahasiswa semester 2 dan 4 Universitas Sanata Dharma dan Universitas Negeri Yogyakarta. Dari 500 eksemplar kuesioner yang disebarakan, setelah diseleksi, akhirnya diperoleh 475 eksemplar yang dijadikan data.¹ Berdasar data yang terkumpul, istilah generasi muda Yogyakarta yang dimaksud dalam kajian ini adalah mahasiswa dari kedua lembaga pendidikan tinggi tersebut.

2. Persaingan Sehat

Indonesia sebagai salah satu masyarakat non Barat yang mengadopsi sistem politik demokrasi mengalami dinamika yang sangat menarik untuk dicermati. Pengadopsian itu menjadikan masyarakat Indonesia terus menerus melakukan adaptasi dengan berbagai nilai yang mendasari sistem demokrasi. Untuk mengukur seberapa jauh perjalanan yang telah dilalui, paling tidak ada tiga aspek yang sangat menentukan kualitas demokrasi. Pertama, adanya persaingan yang sehat untuk meraih posisi-posisi dalam pemerintahan; kedua, partisipasi warga negara dalam politik dan; ketiga, terselenggaranya kebebasan sipil dan politik, termasuk terjaminnya hak-hak asasi manusia (Martinussen, 1997: 195). Ketiga aspek itu secara simultan menjadikan demokrasi dipahami sebagai jalan terbaik menuju terbentuknya kesejahteraan sosial.

Persaingan yang sehat menjadi kriteria pertama kualitas demokrasi didasarkan pada asumsi bahwa hal itu akan menjadi sistem seleksi yang hebat untuk memilih pemimpin terbaik:

The other method of social control is continuous political competition among individuals, parties, or both. Elections and political competition do not make for government by majorities in any very significant way, but they vastly increase the size, number,

¹ Seleksi dilakukan berdasarkan kelengkapan jawaban dan keikutsertaan menjadi pemilih.

and variety of minorities whose preferences must be taken into account by leaders in making policy choices (Dahl, 2006: 132).

Dari kutipan di atas, Dahl menempatkan Pemilu yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil menjadi sarana untuk menyeleksi tokoh dan partai politik yang kredibel dan berkomitmen kuat untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Selain itu, Pemilu juga melahirkan pemerintahan yang menghargai keberagaman dalam masyarakat, sehingga tetap memperhitungkan kelompok minoritas. Apabila tokoh atau partai politik dipandang tidak memperjuangkan kepentingan rakyat dan menghargai keberagaman, dia akan tidak dipilih dalam Pemilu dan akan kalah dalam persaingan. Dari sudut pandang ini, rakyat pemilih memiliki kekuatan yang besar untuk menentukan siapa atau partai politik apa yang akan diberi kekuasaan mengelola negara bangsa. Kekuatan besar rakyat dalam Pemilu akan mampu direpresentasikan dalam bentuk memilih apabila mereka memiliki kebebasan berbicara, kebebasan berserikat dan berkumpul, serta kebebasan mengeluarkan pendapat (Dahl, 2006: 59).

Karakteristik yang dikemukakan Dahl tersebut, kiranya dapat digunakan untuk melihat perjalanan demokrasi di Indonesia yang dewasa ini sedang dalam proses mencari formasi terbaiknya. Dalam pandangan generasi muda yang menjadi pemilih pemula pada Pemilu 2014, persaingan bebas telah terjadi pada Pemilu tahun 2009, baik antar individu maupun partai politik. Persaingan itu berlangsung sangat sportif dan sehat.² Pandangan itu merupakan modal yang sangat berharga untuk mengharapkan peran generasi muda pada pengembangan demokrasi Indonesia ke depan. Pandangan positif terhadap dinamika demokrasi Indonesia itu menjadikan generasi

² Persaingan pada Pemilu legislatif berlangsung sehat: 89,41%, persaingan pada Pemilu Presiden berlangsung sehat: 93,18%. Prosentase diperoleh dengan menggabungkan responden yang menjawab setuju sampai sangat setuju. Perlakuan yang sama juga dilakukan untuk item pertanyaan lain.

muda tidak lagi memandang dunia politik sebagai dunia yang kotor seperti pernah ternarasikan secara kuat pada masa lampau.

... rezim otoriter yang panjang di bawah Demokrasi Terpimpin Soekarno dan Orde Baru Soeharto menutup kesempatan bagi bangsa kita untuk membesarkan partai-partai sebagai aset demokrasi. Sebaliknya, partai-partai dipandang sebagai sumber konflik dan instabilitas politik yang merintang "revolusi yang belum selesai" pada era Soekarno, dan "menghambat pembangunan" pada era Soeharto. Tidak mengherankan jika yang terbentuk kemudian adalah stigma bahwa partai-partai dan politisi sipil adalah bagian dari masa lalu yang buruk, dan lebih jauh lagi stigma bahwa seolah-olah politik itu "kotor" (Syamsuddin Haris, 2006: 69).

Permasalahan yang menarik adalah bahwa persaingan sehat dalam Pemilu tidak serta merta menghasilkan pemimpin yang memiliki komitmen tinggi dan kinerja baik untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Dalam pandangan generasi muda Yogyakarta, pemerintahan periode ke 2 Presiden Susilo Bambang Yudoyono gagal mengembangkan kesejahteraan rakyat.³ Selain itu, pemerintah juga dipandang abai dalam menjaga persatuan Indonesia,⁴ antara lain tampak pada gagalnya melakukan rekonsiliasi nasional terhadap korban kekerasan HAM di masa lampau.⁵ Bahkan cita-cita bangsa Indonesia yang paling konkrit dan sempit pun gagal diwujudkan.⁶

Pandangan responden terhadap pemerintahan SBY di atas tidak jauh berbeda dengan para analis politik Indonesia umumnya. Adi Surya (2013) menjelaskan sebagai berikut:

³ Pemerintah periode 2009 – 2014 gagal meningkatkan kesejahteraan rakyat: 73.41%.

⁴ Kehidupan rakyat pada periode 2009 – 2014 menunjukkan semakin pudarnya nilai persatuan Indonesia dari Pancasila: 71.06%.

⁵ Pemerintah periode 2009 – 2014 gagal melakukan rekonsiliasi nasional, terutama terhadap korban kekerasan tahun 1965 dan Tanjung Priok: 71.76%

⁶ Kehidupan rakyat pada periode 2009 – 2014 menunjukkan bahwa pemerintah tidak memperhatikan nilai keadilan sosial dari Pancasila: 69.65%

John Markoff dalam bukunya *Gelombang Demokrasi Dunia* (2002) menyebutkan empat indikator yang mendasari beroperasinya konsep demokrasi beku yaitu: kondisi perekonomian yang tak kunjung membaik, mandeknya pembentukan masyarakat sipil, konsolidasi sosial politik yang tak pernah mencapai soliditas, dan penyelesaian sosial politik hukum masa lalu yang tak kunjung tuntas.

Demokrasi beku harus diwaspadai karena ada potensi kita menuju ke arah sana. Indikator pertama, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I-2013 sebesar 6,02% dibandingkan periode yang sama tahun lalu atau tumbuh 1,41% dibandingkan triwulan sebelumnya. Meskipun ekonomi Indonesia sedang tumbuh, namun jika tidak disertai dengan pemerataan hanya akan menghasilkan pertumbuhan yang tinggi dengan tingkat kesenjangan yang juga tinggi. BPS mengumumkan data kemiskinan terbaru Indonesia dengan perincian jumlah penduduk miskin per September 2012 mencapai 28,59 juta orang (11,66 persen), menurun dibanding Maret 2012 yang tercatat 29,13 juta orang (11,96 persen). Artinya, dengan pertumbuhan ekonomi yang bagus, justru penurunan kemiskinan berjalan lambat.

Indikator kedua, mandeknya pembentukan masyarakat sipil. Pasca reformasi, pembentukan masyarakat sipil kembali bergeliat. Faultier (2001) dikutip Dzuriyatun Toyibah menjelaskan bahwa sejak reformasi 1998 tengah terjadi peningkatan fungsi masyarakat sipil. Meski demikian, masih terdapat segmen tertentu dari masyarakat sipil yang berwatak eksklusif dan membatasi partisipasi warga negara lainnya. Kebebasan justru digunakan sebagai sebuah cara untuk membatasi partisipasi negara lain. Sebagai contoh, fatwa-fatwa MUI, penyerbuan massa terhadap para pengikut ajaran-ajaran tertentu, kampanye-kampanye penegakan syariat Islam, menunjukkan trend pembangkangan kepada negara mengatasnamakan tafsir tunggal kebenaran tertentu. Masyarakat sipil tumbuh, tetapi tidak disertai ketertiban dan keadaban. Tindakan anarkis dalam

menyuarakan aspirasi sampai pengambilalihan tugas negara dalam menjaga ketertiban umum mewarnai konsolidasi demokrasi kita.

Indikator ketiga, konsolidasi sosial politik yang tak pernah mencapai soliditas. Sistem pemerintahan presidensial dengan multipartai menciptakan iklim demokrasi yang tersandera kepentingan masing-masing partai. Akibatnya kondisi sosial politik menjadi ramai oleh hiruk pikuk. Juan Linz dan Arturo Velenzuela (1994) berpendapat, sistem presidensial yang diterapkan di atas struktur politik multipartai (presidensial-multipartai) cenderung melahirkan konflik antara lembaga presiden dan parlemen serta menghadirkan demokrasi yang tidak stabil. Kegaduhan ini membuat agenda demokratisasi menjadi semakin sumbang. Selain itu, perilaku elit juga turut memperburuk keadaan. Banyaknya kasus pelanggaran hukum, buruknya moral dan kuatnya nalar pragmatisme tidak memberikan degradasi kepada agenda demokratisasi.

Indikator keempat, penyelesaian sosial politik hukum masa lalu yang tak kunjung tuntas. Menurut data dari Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM) terdapat kasus-kasus yang sama sekali belum tersentuh proses hukum seperti pembantaian missal 1965, penembakan misterius, kasus timor timur, Aceh, Papua, Dukun Santet, Marsinah and Bulukumba. Sementara kasus yang macet di Kejaksaan seperti Kasus Talangsari, Mei 1998, Semanggi I dan II dan Penembakan mahasiswa Trisakti.

Fenomena di atas menunjukkan bahwa penggunaan sistem politik demokrasi di Indonesia tidak serta merta menghasilkan peningkatan kualitas hidup berbangsa dan bernegara. Permasalahan yang dihadapi oleh hampir semua negara, terutama negara-negara non Barat, adalah besarnya prosentase sisi gelap dibandingkan sisi terang demokrasi. Kajian teoritis tentang sisi gelap demokrasi, salah satunya adalah pemikiran Sorenson yang menengarai bahwa sistem demokrasi telah berkembang dengan sangat beragam dan bahkan beberapa diantaranya justru menyimpang dari esensi:

The spread of democracy since the end of the cold war has multiplied the variety of more or less democratic systems. This in turn has stimulated a veritable cottage industry of concepts— attempts to produce labels and categories that indicate political systems that have some, but frequently not all and often merely a few, democratic qualities. In other words, the three categories devised by Freedom House (free, partly free, not free) are considered insufficient for describing the current variation in political systems that are more or less democratic. The new concepts are especially directed at countries with some, but far from all, of the characteristics of a political democracy; hence the terms: elite-dominated, frozen, restricted, illiberal, pseudo, hybrid, or electoral democracies... (Sorensen, 2008: 22)

Dari konsep-konsep baru yang dimunculkan oleh Sorensen pada kutipan di atas, salah satu yang menarik para pemerhati sistem demokrasi di Indonesia⁷ adalah demokrasi beku (*frozen democracy*). Demokrasi beku adalah penamaan terhadap proses demokrasi yang mengalami pembusukan karena ketidakmampuan pemerintah yang berkuasa melakukan perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang mendasar, terutama yang menyangkut kepentingan dan perbaikan nasib masyarakat.

3. Partisipasi Politik

Pemikiran tentang partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi mengalami dinamika yang menarik untuk dicermati. Pada masa Perang Dunia II dan dasawarsa setelahnya, kecenderungan yang muncul adalah pemikiran tentang pembatasan partisipasi masyarakat hanya pada pemilihan umum atau pemilu. Pemikiran itu

⁷ Salah satu kajian tentang demokrasi beku di Indonesia adalah tulisan Adi Surya, "Memperkuat Demokrasi di tengah problem kebangsaan" yang terdapat pada <http://gmni-sumedang.blogspot.com/2011/05/memperkuat-demokrasi-di-tengah-problem.html>

antara lain dikemukakan oleh Schumpeter dan Dahl. Schumpeter (1942: 269) menjelaskan:

It will be remembered that our chief troubles about the classical theory centered in the proposition that "the people" hold a definite and rational opinion about every individual question and that they give effect to this opinion—in a democracy—by choosing "representatives" who will see to it that that opinion is carried out. Thus the selection of the representatives is made secondary to the primary purpose of the democratic arrangement which is to vest the power of deciding political issues in the electorate. Suppose we reverse the roles of these two elements and make the deciding of issues by the electorate secondary to the election of the men who are to do the deciding. To put it differently, we now take the view that the role of the people is to produce a government, or else an intermediate body which in turn will produce a national executive or government. And we define: the democratic method is that institutional arrangement for arriving at political decisions in which individuals acquire the power to decide by means of a competitive struggle for the people's vote.

Dari kutipan di atas dapat dengan jelas dipahami bahwa Schumpeter memandang pemilihan "perwakilan" merupakan tujuan atau agenda utama proses demokrasi. Pernyataan itu menunjukkan bahwa posisi rakyat hanya penting pada saat pemilu, yaitu sebagai pemilih. Setelah pemilihan usai dan kepemimpinan nasional terbentuk, posisi rakyat tidak lagi penting, dan bahkan lebih banyak menjadi objek.

Tidak jauh berbeda dengan Schumpeter, dalam tulisannya Dahl menempatkan pemilihan sebagai pusat dari sistem demokrasi. Hal itu dijelaskannya dalam bentuk apendik sebagai berikut:

A. *The definition characteristic of polyarchy*

Polyarchy is defined loosely as a political system in which the following conditions exist to a relatively high degree:

During the voting period:

1. *Every member of the organization performs the acts we assume to constitute an expression of preference among the scheduled alternatives, e.g., voting.*
2. *In tabulating these expressions (votes), the weight assigned to the choice of each individual is identical.*
3. *The alternative with the greatest number of votes is declared the winning choice.*

During the prevoting period:

1. *Any member who perceives a set of alternatives, at least one of which he regards as preferable to any of the alternatives presently scheduled, can insert his preferred alternative(s) among those scheduled for voting.*
2. *All individuals possess identical information about the alternatives. During the postvoting period:*
3. *Alternatives (leaders or policies) with the greatest number of votes displace any alternatives (leaders or policies) with fewer votes.*
4. *The orders of elected officials are executed.*

During the interelection stage:

- 8.1. *Either all interelection decisions are subordinate or executory to those arrived at during the election stage, i.e., elections are in a sense controlling*
- 8.2. *Or new decisions during the interelection period are governed by the preceding seven conditions, operating, however, under rather different institutional circumstances*
- 8.3. *Or both.*

Dari kutipan di atas dapat diambil pemahaman bahwa Dahl menempatkan pemilihan sebagai pusat dari sistem demokrasi. Melalui proses pemilihan, rakyat sebagai pemilih dapat menentukan pilihan dari bermacam partai, tokoh dan program, yang dipandangnya terbaik. Peserta pemilihan yang memperoleh suara terbanyak dinyatakan sebagai pemenang, sehingga program-program yang dijanjikan dapat dieksekusi (Dahl, 1956/2006: 84). Dari sudut pandang ini, Dahl memandang kedudukan partisipasi rakyat pada pemilihan umum sangat penting, karena mendorong terjadinya perubahan kepemimpinan, kebijakan, dan program nasional.

Dari dua pemikiran tentang demokrasi tampak bahwa partisipasi rakyat secara besar-besaran dalam berbagai tahapan proses demokrasi tidak dikehendaki dan bahkan dipandang berbahaya. Berbagai alasan disusun untuk mendukung pandangan itu, seperti isu-isu politik adalah terlalu jauh dari kehidupan keseharian rakyat, sehingga tidak mungkin mereka dapat memahami dan ikut terlibat untuk mengambil kebijakan nasional. Alasan lain adalah bahwa partisipasi massa rakyat akan mendorong naiknya kegiatan politik diantara anggota masyarakat kelas bawah. Menurut Dahl, hal itu akan sangat berbahaya, karena perilaku mereka cenderung otoriter, sehingga dapat menghancurkan berbagai norma yang menjadi sendi-sendi demokrasi, seperti dijelaskannya sebagai berikut:

The same difficulties apply to the relationship between polyarchy, political activity, and consensus on the basic norms. But here we may encounter an added problem, for current evidence suggests that in the United States the lower one's socioeconomic class, the more authoritarian one's predispositions and the less active politically one is likely to be. Thus if an increase in political activity brings the authoritarian-minded into the political arena, consensus on the basic norms among the politically active certainly must be declining (Dahl, 1956/2006: 89).

Pemikiran tentang partisipasi berkembang pada dasawarsa-dasawarsa selanjutnya. Pada periode itu partisipasi masyarakat dipandang sebagai tidak hanya untuk melahirkan pemerintahan, yaitu legislatif dan eksekutif. Partisipasi dipahami sebagai salah satu nilai penting dalam demokrasi, sehingga kehadirannya diperlukan. Paling tidak terdapat tiga fungsi partisipasi bagi perkembangan demokrasi, yaitu pendidikan politik, kohesivitas dan progresivitas sosial, serta terciptanya pemerintahan yang bersih dan baik:

From these theories on participatory democracy, three functions of participation can be distinguished. The first is the educative function: participation contributes to personal growth in making citizens public citizens... A second function of participatory democracy is the integrative function. Participation contributes to people's feeling that they belong to their community. Finally, participatory democracy ensures good government; as mentioned previously for Rousseau, participation plays an important role in producing and implementing laws and rules that are acceptable to all (Michels, 2006: 326)

Dari perspektif pendidikan politik, partisipasi dalam berbagai tahapan demokrasi akan melahirkan kesadaran setiap individu sebagai warga negara. Kesadaran itu pada tingkat selanjutnya akan melahirkan perilaku setiap individu anggota masyarakat untuk mengembangkan kebaikan bersama atau yang oleh Mill (1975) disebut sebagai "*public-oriented citizens*". Arena belajar demokrasi terbaik, terutama partisipasi, adalah pada level lokal. Partisipasi dapat dilakukan mulai dari tahap pemilihan, perencanaan kebijakan dan program, pelaksanaan sampai pada evaluasi.

Dari perspektif penegakan kohesivitas dan progresivitas sosial, partisipasi dalam setiap tahapan demokrasi akan melahirkan kesadaran bahwa setiap individu adalah saling terkait dan tergantung dengan masyarakatnya. Apabila setiap individu merasa memiliki dan dimiliki masyarakat, maka dalam diri mereka akan tumbuh perilaku untuk menjaga kohesivitas atau kerukunan sosial yang telah

tercipta. Di pihak lain, dalam diri mereka juga akan tumbuh perilaku untuk tetap mengembangkan kualitas kehidupan bersama atau progresivitas sosial.

Dari sudut pandang terciptanya pemerintahan yang bersih dan baik (*clean and good government*), partisipasi akan melahirkan tuntutan keterbukaan manajemen pemerintahan dan kontrol ketat terhadap setiap tahapan demokrasi. Keterbukaan dan kontrol ketat masyarakat akan sangat membantu mengurangi peluang terjadinya penyimpangan, korupsi dan berbagai sisi gelap demokrasi lainnya. Di pihak lain, dalam masyarakat juga berkembang kesadaran akan tanggungjawab mereka terhadap terciptanya pemerintahan yang bersih dan baik. Dari perspektif hukum, partisipasi masyarakat untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan baik juga sangat penting, terutama dalam ikut memproduksi dan menegakkan hukum yang berlaku, baik di tingkat lokal maupun nasional.

Dari perkembangan pemikiran tentang partisipasi politik dapat dipahami bahwa partisipasi masyarakat dalam Pemilu adalah sangat penting, tetapi bukan satu-satunya. Partisipasi politik juga perlu dilakukan pasca Pemilu, terutama dalam penentuan kebijakan atau program, eksekusi sampai evaluasi. UNDP memberikan kriteria kepemimpinan yang baik sebagai berikut:

- 1) Partisipasi, menunjuk pada keikutsertaan seluruh warga negara dalam pengambilan keputusan yang dilakukan secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan.
- 2) Penegakan hukum atau peraturan, penegakan hukum harus diterapkan secara adil dan tegas.
- 3) Transparansi, seluruh proses pemerintahan dapat diakses dengan publik.
- 4) Responsif, lembaga pemerintah harus selalu tanggap terhadap kepentingan publik.
- 5) Konsensus, Pemerintah harus dapat menjembatani perbedaan kepentingan demi tercapainya konsensus antar kelompok.
- 6) Keadilan, kesetaraan pelayanan bagi seluruh warga.

- 7) Efektifitas dan efisiensi, Merujuk pada proses pemerintahan yang dapat mencapai tujuan dan menggunakan dana seoptimal mungkin
- 8) Akuntabel, seluruh proses pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan.
- 9) Visi Strategis, pemerintah mempunyai visi jauh kedepan yang dapat mengantisipasi perubahan (Rihandoyo, 2010).

Pentingnya ikut berpartisipasi politik dalam Pemilu 2014 juga menjadi kesadaran generasi muda Yogyakarta. Bahkan sebagian besar dari mereka juga ikut melibatkan diri dalam mengontrol pencatatan pemilih.⁸ Fenomena yang menarik dari partisipasi pemilih pemula Yogyakarta adalah rasionalitas pilihan mereka. Pada pemilihan legislatif, sebagian besar dari mereka tidak mempersoalkan gender (87.06%), hubungan darah (79.53%), kesamaan daerah asal (73.88%), dan ikatan agama (66.59%). Bahkan mereka juga tidak mempertimbangkan pilihan orang tua (77.65%), apalagi *money politics* (84.47%). Pilihan mereka terutama didasarkan pada rekam jejak para calon legislator (88.71%), dan komitmen untuk menjunjung tinggi bhineka tunggal ika dan menjaga kerukunan masyarakat (90.59%). Pola yang sama juga terjadi pada alasan mereka dalam pemilihan presiden/wakil presiden.

Fenomena itu merupakan perkembangan yang cukup menggembarakan untuk peningkatan kualitas demokrasi Indonesia di masa depan. Apabila dilihat dari tingkatan rasionalitas tindakan sosial yang dikembangkan Max Weber, generasi muda Yogyakarta paling tidak telah mampu keluar dari rasionalitas tradisional, yaitu pembenaran tindakan sosial yang didasarkan pada petunjuk dan kebiasaan masa lalu yang diberikan nenek moyang dan berlaku turun temurun, maupun rasionalitas afektif, yaitu pembenaran tindakan

⁸ Mengawasi tahapan pencatatan pemilih, sehingga semua warga negara yang telah memenuhi persyaratan dapat terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2014: 64%

sosial yang didasarkan pada aspek emosi atau afeksi. Dalam kadar tertentu, tindakan mereka dapat dikategorikan sebagai rasionalitas nilai, yaitu pembenaran tindakan sosial yang didasarkan pada nilai yang berkembang dalam komunitas (Ringer, 1997: 106).

Partisipasi dengan dilandasi rasionalitas nilai yang terjadi pada Pemilu 2014 tidak diikuti pada pengawasan kinerja tokoh yang mereka pilih menjadi pemimpin, seperti terlihat pada tabel 1 dibawah ini.

Tabel 1: Partisipasi Terhadap Hasil Pemilu Legislatif 2014

Pertanyaan	Ya	Tidak
mengawasi kinerja anggota legislatif 58%	58.12%	41.88%
mempertanyakan anggota legislatif terpilih yang membuat kebijakan menyimpang dari kepentingan rakyat 44%.	44.00%	56.00%
melakukan aksi protes kepada anggota legislatif terpilih, apabila kebijakan yang dibuat menyimpang dari kepentingan rakyat 40%	40.47%	59.53%
melakukan aksi protes kepada anggota legislatif terpilih, apabila dia tidak peduli terhadap kepentingan rakyat 40%	40.00%	60.00%
mempertanyakan anggota legislatif terpilih yang melakukan tindakan melanggar hukum 34%	34.35%	65.65%
berjuang secara nyata untuk menurunkan anggota legislatif terpilih, apabila dia melakukan tindakan melanggar hukum 48%	48.24%	51.76%

Dari tabel di atas dapat diambil pemahaman bahwa sebagian besar generasi muda Yogyakarta tidak mau peduli terhadap kebijakan yang diambil oleh para anggota legislatif. Memperbincangkan kebijakan politik yang diambil oleh anggota legislatif pun merupakan hal yang tidak mau dilakukan, apalagi melakukan protes melalui

demonstrasi. Bahkan mereka juga tidak mau peduli apabila diantara anggota legislatif terdapat individu yang melakukan pelanggaran hukum.

Realitas itu apabila dikaitkan dengan fenomena politik nasional kontemporer, yaitu perseteruan antara Koalisi Merah Putih (KMP) dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH), akan tidak menjadi menu perbincangan diantara generasi muda Yogyakarta. Merupakan harapan yang terlalu jauh apabila menghendaki mereka tertarik dan terdorong untuk melakukan diskursus kritis terhadap keputusan DPR tentang pilkada oleh DPRD yang diwarnai manuver partai Demokrat.

Pola yang sama juga mereka lakukan terhadap Presiden dan Wakil Presiden terpilih, seperti dapat disimak pada tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2: Partisipasi Terhadap Hasil Pemilu Presiden/Wakil Presiden 2014

Pertanyaan	Ya	Tidak
mengawasi kinerja presiden dan wakil presiden terpilih dalam membuat keputusan di pemerintahan 48.00%	48.00%	52.00%
mempertanyakan presiden dan wakil presiden terpilih yang membuat kebijakan menyimpang dari kepentingan rakyat 33.88%	33.88%	66.12%
melakukan aksi protes kepada presiden dan wakil presiden terpilih, apabila kebijakan yang dibuat menyimpang dari kepentingan rakyat	40.24%	59.76%
mempertanyakan presiden dan wakil presiden terpilih, apabila kebijakan yang dibuat mengancam kerukunan masyarakat	33.88%	66.12%
melakukan aksi protes kepada presiden dan wakil presiden terpilih, apabila kebijakan yang dibuat mengancam kerukunan masyarakat	40.24%	59.76%
melakukan aksi protes kepada presiden dan wakil presiden terpilih, apabila mereka tidak peduli terhadap kepentingan rakyat	36.94%	63.06%

Pertanyaan	Ya	Tidak
mempergunjingkan presiden dan wakil presiden terpilih yang melakukan tindakan melanggar hukum	31.29%	68.71%
berjuang secara nyata untuk menurunkan presiden dan wakil presiden terpilih, apabila mereka melakukan tindakan melanggar hukum	44.71%	55.29%

Meskipun polanya sama, partisipasi politik generasi muda Yogyakarta terhadap presiden/wakil presiden terpilih memiliki keunikan. Secara garis besar, prosentase kepedulian mereka terhadap kebijakan politik eksekutif lebih kecil. Dengan kata lain, ketidakpedulian terhadap eksekutif lebih besar dari pada hal yang sama terhadap legislatif.

Tanpa bermaksud menarik generalisasi terhadap temuan penelitian ini, tetapi fenomena pasifnya partisipasi pemilih pemula Yogyakarta tidak berdiri sendiri. Fenomena yang sama juga ditemui pada masyarakat luas. Pada *Kedaulatan Rakyat* 22 September 2014 diberitakan bahwa 80% masyarakat kota Yogyakarta yang indeks demokrasiya tertinggi, tidak bersedia mempertanyakan atau menagih janji DPR/DPRD:

Ternyata anggota legislatif bisa lenggang kangkung, bahkan dapat melupakan janjinya saat kampanye pada Pemilu Legislatif 2014 lalu. Sebab, 80% warga menyatakan tak pernah menagih janji wakil rakyat yang terpilih. Rakyat 'ogah' mempertanyakan janji-janji mereka saat kampanye.

4. Penutup

Dari kajian yang telah dilakukan dengan mengambil generasi muda pemilih pemula sebagai responden tampak bahwa ditinjau dari aspek persaingan yang sehat, Pemilu di Indonesia telah mengalami perkembangan yang menggembirakan. Meskipun demikian, perlu diakui bahwa persaingan sehat itu tidak serta merta melahirkan

pemimpin bangsa yang berkualitas. Bahkan dikhawatirkan demokrasi di Indonesia terjebak menjadi demokrasi beku. Dari sudut pandang ini, eksplorasi untuk menemukan akar masalah dan sistem seleksi kepemimpinan nasional menjadi usaha yang perlu segera dilakukan.

Ditinjau dari perspektif partisipasi, keterlibatan generasi muda pemilih pemula dalam proses Pemilu 2014 cukup menggembirakan, karena mereka lebih menggunakan rasionalitas nilai dalam menentukan pilihan. Akan tetapi partisipasi politik mereka berhenti hanya pada proses Pemilu dan tidak berlanjut pada hasilnya, dalam arti mengawal dan mengawasi kinerja para pemimpin nasional. Ketidakpedulian generasi muda untuk mengawasi kinerja para pemimpin yang mereka pilih merupakan realitas yang perlu dicari genetika historis dan solusinya.

Daftar Pustaka

- Dahl, Robert, A., 2006, *A Preface to Democratic Theory*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Mann, Michael, 2005, *The Dark Side of Democracy*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Markoff, John, 2002, *Wave of Democracy: social movement and political change*. California: Pine Forge Press.
- Martinussen, John, 1997, *Society, state, and market: A guide to competing theories of development*. London: Zed Book.
- Michels, Ank M. B., 2006, "Citizen participation and democracy in the Netherlands". Artikel pada jurnal *Democratization*, Vol.13, No.2, April 2006, pp. 323-339.
- Mill, John Stuart, 1975, *Representative Government*. Oxford: Oxford University Press.
- Schumpeter, Joseph A., 1976, *Capitalism, Socialism, Democracy*. London: George Allen & Unwin.
- Syamsuddin Haris, 2006, "Demokrasi Partai dan Dilema Sistem Kepartaian di Indonesia". Diterbitkan dalam *Jurnal Penelitian Politik* Volume III No 1 Tahun 2006. ISSN 1829-8001. Jakarta: LIPI
- Rihandoyo, 2010, *Aktualisasi Peran Serta Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah*. Semarang: FISIPOL Universitas Diponegoro.
- Ringer, Fritz. (1997). *Weber's Methodology*. Cambridge: Harvard University Press.
- Sahasrad, Herdi, 2009, *Century Gate: Refleksi Ekonomi-Politik Skandal Bank Century*. Jakarta: Lingkar Studi Islam dan Kebudayaan (LSIK).

Surya, Adi, 2013, *15 Tahun Reformasi dan Bekunya Demokrasi* dimuat pada <http://gmni-sumedang.blogspot.com/2013/05/15-tahun-reformasi-dan-bekunya-demokrasi.html>

Yudoyono, Susilo Bambang, 2004, *Vision for the Change*. Singapore: Brighten Press.

Republika, 5 Juli 2012

Kedaulatan Rakyat 22 September 2014